

KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA



SENGKETA, KONFLIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
**HUKUM
ADAT**

Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	1
BAB I HUKUM ADAT DIPERSIMPANGAN JALAN	3
Relasi Agama dan Hukum Adat	10
Quo Vadis Hukum Adat di Era Kontemporer	11
BAB II MASYARAKAT ADAT INDONESIA	15
DALAM PLURALISME HUKUM	
Lahirnya Masyarakat Adat	22
Siapa masyarakat adat?	24
Mencari makna pengakuan hukum	30
Originalitas hak masyarakat adat	32
Hukum adat sebuah kilas Balik	34
BAB III RAGAM KONFLIK TANAH ADAT	42
Sengketa Tanah Masyarakat adat Pubabu	45
Hak Ulayat di Gunung Sahilan	46
Dua Terdakwa di Cagar Alam Maninjau	49
Tanah Adat Dayang Meratus	51
Sengketa Tanah Adat Betang Sangkuwu	52
Sengketa Tanah Adat di Talonang	53
Sengketa Tanah di Kerinci	55
Sengketa pada Masyarakat Adat Sawai	56

Sengketa pada London Sumatera	61
Sengketa Tanah Adat Suku Moi	63
Sengketa Adat Manis Mata	64
Penolakan Hutan Lindung Gunung Lumut	65
Sengketa Tanah Adat Betang	66
Protes Suku Dayak Iban	68
BAB IV PENGAKUAN ADAT DALAM BINGKAI PUTUSAN HAKIM (STUDI HUKUM ADAT BATAK)	71
Hukum Adat di Indonesia	77
Corak Hukum Adat dalam Masyarakat Batak	79
Relasi Hukum Adat dan Putusan Pengadilan	83
Pengakuan "Hak Perempuan" dalam Pewarisan Patrilineal Masyarakat Batak	86
<i>Tungkot</i> dalam Perkawinan Adat Batak	92
BAB V PERLINDUNGAN LEGISLASI TERHADAP MASYARAKAT ADAT	99
Konstitusi Negara	105
Putusan Mahkamah Konstitusi	108
Undang-Undang	110
Peraturan Daerah	117
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT	133
Penantian Panjang Perlindungan MHA	138
RUU Masyarakat Hukum Adat	142
<i>Judicial Review</i>	143
Urgensi Undang-Undang Hukum Adat	151
Lampiran RUU Masyarakat Hukum Adat	162
Daftar Pustaka	201



SENKETA, KONFLIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

HUKUM ADAT

Pengakuan atas eksistensi masyarakat hukum adat mengindikasikan bahwa terdapat penghargaan negara atas sifat kodrat manusia sebagai makhluk monodualis, yaitu manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Soerjono Soekanto mendefinisikan hukum adat pada hakekatnya merupakan hukum kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan kebiasaan biasa, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Sementara itu Hazairin berpendapat bahwa hukum adat adalah resapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat.

Hukum Adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat yang memiliki sanksi. Sanksi yang diberlakukan dapat berupa sanksi moral, sanksi harta seperti pembayaran denda/harta, dan sanksi pidana adat dikarenakan pelanggaran delik adat. Sanksi moral akan terjadi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dan oleh komunitas masyarakatnya terbentuk "stigma" bersalah sehingga dikucilkan dalam komunitas tertentu.



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Diterbitkan Oleh :
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
Cetakan Pertama ©2020

Jl. Kramat Raya 57 Jakarta Pusat
Telp. 021 390 5455, Fax. 021 390 5455 PO BOX 2685
Website : www.komisiyudisial.go.id



ISBN 978-623-91461-1-9

